

# Panduan Pembiayaan Iklim untuk Pemerintah Daerah di Indonesia

Agustus 2023



# Daftar Isi

- 03 **Gambaran umum & poin penting**
- 04 **Pendahuluan**
- 05 **Langkah 1: Lingkungan yang mendukung, pengembangan strategi penanganan iklim, dan persiapan proyek**
  - 05 1a. Pengembangan lingkungan yang mendukung
  - 06 1b. Penyelarasan strategi penanganan perubahan iklim antara pemerintah daerah dan pusat
  - 07 1c. Persiapan proyek
- 08 **Langkah 2: Pembiayaan proyek: Instrumen dan opsi**
- 10 **Langkah 3: Modalitas keuangan prospektif untuk proyek iklim kota**
- 11 **Langkah 4: Mengakses pendanaan dalam negeri dan internasional**
- 12 **Langkah 5: Sumber daya dukungan teknis untuk pembiayaan iklim kota**
  - 14 Daftar PPF untuk infrastruktur tahan perubahan iklim di Indonesia
  - 15 Sumber daya persiapan proyek
  - 15 Sumber daya strategi pembiayaan
  - 16 Panduan lainnya
- 17 **Kesimpulan**



CDP berterima kasih atas dukungan [Global Covenant of Mayors for Climate & Energy](#) dalam penyusunan panduan ini.



# Gambaran umum & poin penting

Tiga tahun setelah dicanangkannya 'aksi satu dekade' PBB untuk memerangi perubahan iklim, berbagai kota di seluruh dunia telah memelopori pengembangan strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pada saat yang bersamaan, pemerintah daerah masih menghadapi kendala besar dalam mengakses pembiayaan yang dibutuhkan untuk mewujudkan rencana mereka, terutama di negara-negara bagian selatan dunia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, dengan ekonomi yang berkembang pesat dan berada di garis depan dalam menghadapi risiko terkait perubahan iklim, Indonesia menjadi contoh mengenai perlunya meningkatkan investasi untuk memberikan solusi terkait perubahan iklim.

CDP menyusun panduan ini sebagai alat bantu bagi pejabat pemerintah daerah di Indonesia dalam mempersiapkan diri mengembangkan proyek infrastruktur berkelanjutan untuk mengatasi perubahan iklim. Isi panduan ini dirancang sedemikian rupa agar dapat diterapkan berbagai pemerintah daerah dan regional di Indonesia dengan jumlah populasi, situasi kependudukan, kondisi iklim, dan lingkungan politik yang berbeda-beda. Panduan ini merupakan sumber informasi bagi pemerintah daerah yang memiliki tujuan khusus untuk mengedepankan pelaksanaan proyek infrastruktur yang berkelanjutan, berketahanan, dan berkeadilan.

Bagian pertama panduan ini memberikan gambaran umum mengenai proses persiapan proyek dan diskusi mengenai instrumen dan opsi keuangan yang tersedia untuk pembangunan. Bagian kedua panduan ini menyajikan informasi mengenai gambaran umum pemberian bantuan dan panduan teknis dalam mengakses dana untuk membiayai proyek berketahanan iklim di kota-kota di Indonesia.

Dengan menggunakan panduan ini, pejabat pemerintah kota di Indonesia diharapkan akan lebih memahami ekosistem pembiayaan yang ada bagi proyek-proyek infrastruktur berkelanjutan untuk mengatasi perubahan iklim. Para pejabat tersebut dapat menggunakan pengetahuan ini untuk mengambil keputusan yang tepat, menggandeng mitra, dan mengedepankan pelaksanaan proyek infrastruktur berketahanan dan berkelanjutan.

# Pendahuluan



**16** pemerintah kota

di Indonesia melaporkan proyek infrastruktur terkait perubahan iklim di tahun 2022 melalui CDP-ICLEI Track dengan total biaya sebesar

**453 juta dolar AS**

**33%**

proyek yang diungkapkan oleh beberapa pemerintah kota di Asia Pasifik tidak memiliki estimasi kebutuhan pendanaan.

Mengingat 57% dari penduduk Indonesia tinggal di perkotaan<sup>1</sup>, perubahan iklim menjadi ancaman yang mendesak bagi perkotaan di Indonesia. Indonesia sangat rentan terdampak perubahan iklim karena kondisi geografis dan ketergantungan perekonomiannya terhadap sumber daya alam (SDA), sedangkan perkotaannya berisiko mengalami bencana, seperti banjir, kenaikan muka air laut, panas ekstrem, dan kekeringan. Salah satu isu paling mendesak di kota-kota tersebut adalah banjir, yang dapat menyebabkan kerusakan luas infrastruktur dan perumahan serta korban jiwa. Indonesia telah beberapa kali mengalami banjir besar dalam beberapa tahun terakhir, dengan dampak hilangnya tempat tinggal bagi ribuan orang dan kerugian ekonomi yang signifikan. Naiknya permukaan air laut juga menjadi ancaman nyata bagi kota-kota pesisir dengan jumlah penduduk yang tinggi dan memiliki infrastruktur penting<sup>2</sup>.

Indonesia juga merupakan negara penghasil karbon terbesar kelima di dunia<sup>3</sup>. Indonesia berkomitmen mengurangi emisinya sebesar 43,2% dari tingkat emisi dalam skenario 'bisnis seperti biasa' (business-as-usual/BAU) pada tahun 2030, dengan visi untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060 atau lebih cepat, sesuai dengan Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC) terbaru<sup>4</sup>.

Indonesia perlu memobilisasi dana sekitar 322 miliar dolar AS<sup>5</sup> untuk mencapai target NDC tersebut. Oleh karena itu, semua tingkat pemerintahan dapat berperan dalam menyusun rencana proyek dan menyalurkan pembiayaan iklim untuk infrastruktur terkait perubahan iklim di Indonesia.

Pada tahun 2022, 16 pemerintah kota di Indonesia melaporkan proyek infrastruktur terkait perubahan iklim melalui CDP-ICLEI Track dengan total biaya sebesar 453 juta dolar AS. Hampir semua proyek yang [dilaporkan](#) pemerintah kota di Indonesia saat ini tengah membutuhkan pembiayaan sebagian atau penuh.

Terdapat beberapa hambatan dalam memasuki pasar yang dapat menghalangi pemerintah daerah di Indonesia untuk mengakses pembiayaan proyek infrastruktur, seperti kurangnya kelayakan kredit, biaya pinjaman yang tinggi, kurangnya dana yang tersedia, dan kurangnya proyek yang dapat didanai oleh bank. Berdasarkan pelaporan sejumlah kota melalui CDP-ICLEI Track pada tahun 2022, sebanyak 33% (56) proyek yang diungkapkan oleh beberapa pemerintah kota di Asia Pasifik tidak memiliki estimasi kebutuhan pendanaan<sup>6</sup>. Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan pemahaman mengenai kebutuhan pembiayaan yang dihadapi kota-kota di kawasan ini. Oleh karena itu, kesenjangan ini perlu diatasi dengan memberikan informasi mengenai cara agar pemerintah kota dapat memaksimalkan sumber daya yang tersedia. Panduan ini bertujuan mendukung pemerintah daerah di Indonesia untuk meningkatkan pemahamannya mengenai mekanisme dan sumber daya yang tersedia agar dapat mengakses pembiayaan untuk proyek-proyek infrastruktur terkait perubahan iklim.

1 Data Bank Dunia, 2021, <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=ID>

2 Sumber: World Bank Knowledge Portal. <https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/indonesia/impacts-sea-level-rise>

3 Climate Watch. 2022. Washington, DC: World Resources Institute. Tersedia secara online di: <https://www.climatewatch-data.org>.

4 Enhanced Nationally Determined Contribution, Republic of Indonesia. 2022. [https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-09/23.09.2022\\_Enhanced%20NDC%20Indonesia.pdf](https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-09/23.09.2022_Enhanced%20NDC%20Indonesia.pdf)

5 Sumber: CNBC Indonesia. Tautan: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221118201327-4-389459/capai-karbon-zero-2030-ri-butuh-rp-5000-t-duit-dari-mana>

6 CDP Asia Pacific Climate Finance Snapshot. <https://www.cdp.net/en/research/global-reports/asia-pacific-cities-climate-finance-snapshot>



## Langkah 1

# Lingkungan yang mendukung, pengembangan strategi penanganan iklim, dan persiapan proyek

Agar dapat memperoleh pembiayaan untuk proyek infrastruktur terkait perubahan iklim, suatu kota harus terlebih dahulu mempersiapkan landasan untuk meningkatkan kualitas rencana proyeknya guna menciptakan proyek yang siap mendapatkan investasi. Rencana proyek yang siap mendapatkan investasi ini penting untuk menarik investasi, mempercepat pelaksanaan proyek, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan membangun kepercayaan investor. Hal ini terutama karena investor cenderung lebih tertarik untuk berinvestasi dalam proyek yang telah dipersiapkan secara matang dan dievaluasi dengan baik, karena dianggap memiliki risiko yang lebih rendah dan peluang keberhasilan yang lebih tinggi. Tahap-tahap awal pembiayaan proyek tersebut dibahas di bawah ini, dengan beberapa sumber terkait yang ditautkan di [bagian bantuan teknis](#).

## 1a. Pengembangan lingkungan yang mendukung

Pengembangan aspek legal, kebijakan, peraturan, dan pengelolaan kota yang selaras dapat menciptakan kondisi yang kondusif untuk menyusun rencana aksi penanganan perubahan iklim, persiapan proyek, dan pembiayaannya. Dalam menciptakan [lingkungan yang mendukung](#) pengembangan proyek untuk mengatasi perubahan iklim, diperlukan pula kajian mengenai peran sektor swasta, pembiayaan, lembaga perantara, dan pemerintah kota. Di Indonesia, faktor pendukung dalam menetapkan target dan aksi penanganan perubahan iklim sebagian besar didorong oleh pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah daerah juga dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik di wilayah masing-masing untuk menarik pembiayaan dari sektor swasta untuk proyek infrastruktur terkait perubahan iklim, misalnya Gubernur DKI Jakarta yang mengeluarkan peraturan terkait bangunan hijau, untuk menyediakan insentif bagi pemilik bangunan.

Upaya nyata telah dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, misalnya di Jakarta dan Semarang, dengan menerbitkan peraturan tentang insentif dan menggalakkan penggunaan panel atap surya untuk gedung pemerintahan. Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali juga menjadi pelopor dalam penggunaan kendaraan listrik dengan memperkenalkan zona kendaraan rendah emisi dan mendorong penerapan konsep bangunan ramah lingkungan di area komersial.

Gambar 1. Berikut ini peta jalan target iklim di Indonesia



## 1b. Penyelarasan strategi penanganan perubahan iklim antara pemerintah daerah dan pusat

Penyusunan strategi penanganan perubahan iklim yang selaras dengan prioritas kota sangat diperlukan untuk memenuhi target khusus mitigasi dan ketahanan terhadap perubahan iklim, yang dapat disesuaikan dengan target penanganan perubahan iklim tingkat nasional. Hal ini menjadi langkah yang penting sebelum dilakukannya persiapan proyek (Gambar 1).

Di Indonesia, target penanganan perubahan iklim ditetapkan oleh pemerintah Indonesia agar selaras dengan target dalam Perjanjian Paris, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagaimana ditetapkan dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, dan target emisi nol bersih nasional. Pemerintah daerah kemudian mengembangkan strategi dan rencana aksi penanganan perubahan iklim yang menjadi dasar untuk rencana proyek terkait penanganan perubahan iklimnya. Strategi dan rencana ini dikembangkan melalui pendekatan bawah ke atas (*bottom-up*), dengan proyek yang diusulkan pemerintah daerah dan kementerian terkait. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan kementerian terkait berperan penting dalam merumuskan strategi penanganan perubahan iklim menjadi upaya yang nyata.

Selain pertimbangan kebutuhan pembiayaan, pengembangan strategi penanganan perubahan iklim harus didasarkan bukti dan penilaian risiko, dampak, dan emisi GRK (sebagai contoh, lihat panduan pelatihan [Climate Risk and Vulnerability Assessment](#) CDP).

Untuk mewujudkan strategi penanganan perubahan iklim menjadi upaya yang nyata, diperlukan pemahaman tentang cara menyusun proyek infrastruktur terkait perubahan iklim yang meliputi berbagai kegiatan mulai dari identifikasi proyek hingga persiapan proyek, misalnya pelaksanaan studi kelayakan dan proses transaksi. Persiapan proyek penting dilakukan guna memastikan keberhasilan suatu proyek. Kegiatan ini membantu penyusunan tujuan dan target yang jelas beserta rencana proyek yang realistis, sekaligus mengidentifikasi dan mengelola risiko, melibatkan pemangku kepentingan, memperoleh dana dan sumber daya, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi.

### Pentingnya pelaporan data lingkungan

Saat sebuah kota mulai menyusun perencanaan, para pejabat pemerintah kota tersebut juga harus memahami manfaat pelaporan data lingkungan melalui CDP-ICLEI Track yang membantu kota tersebut menyelaraskan rencana penanganan perubahan iklimnya dengan standar yang diakui secara internasional, serta memberikan kerangka menyeluruh untuk mengukur dan mengelola kemajuan strategi penanganan perubahan iklimnya. Melalui pelaporan, kota juga dapat mengakses sumber daya bantuan teknis secara gratis dan berpartisipasi dalam proyek dan inisiatif lingkungan global, misalnya Global Covenant of Mayors for Climate and Energy, Cities Race to Zero and Cities Race to Resilience dari UNFCCC, Matchmaker Program dari CDP, dan berbagai tawaran dari mitra lainnya, misalnya ICLEI dan C40.

## 1c. Persiapan proyek

[Cities Climate Finance Leadership Alliance](#) (CCFLA) mendefinisikan ‘persiapan proyek’ sebagai “proses menjelaskan, mempelajari, menyempurnakan, dan mengembangkan konsep proyek infrastruktur hingga pelaksanaan proyek tersebut dapat memperoleh pembiayaan dari sumber daya publik atau swasta.”

Kematangan atau kurangnya persiapan proyek dapat menentukan berlanjut atau terhambatnya proyek tersebut di tahap perencanaan. Karena persiapan proyek memerlukan sumber daya teknis dan keuangan (hingga 10% biaya konstruksi, menurut [Bank Dunia](#)) penyusunan anggaran untuk persiapan proyek juga harus dipertimbangkan oleh pemerintah kota pada tahap awal perencanaan. Strategi penanganan perubahan iklim yang andal dan lingkungan pendukung yang kondusif dapat membantu kelancaran persiapan proyek.

Dalam persiapan proyek itu sendiri, ada beberapa tahap berbeda sebagaimana [diuraikan oleh CCFLA](#) dan diuraikan kembali sebagai berikut.

### ▼ Konsep/rancangan/pemeriksaan awal

Merumuskan proyek: jenis proyek, unsur yang akan disertakan, keterkaitan proyek ini dengan prioritas yang ditetapkan dalam strategi penanganan perubahan iklim, dan kebutuhan masyarakat yang akan dipenuhi melalui proyek tersebut.

### ▼ Studi Pra-kelayakan

Analisis awal teknis dan biaya-manfaat (*cost-benefit*) untuk menentukan perlu tidaknya melakukan studi kelayakan yang lebih mendalam untuk suatu proyek.

### ▼ Studi Kelayakan

Studi menyeluruh mengenai dapat tidaknya suatu proyek dilaksanakan dari perspektif teknis/

rekayasa (*engineering*) dan keuangan/ekonomi. Tingkat perincian yang diperlukan dapat bervariasi bergantung pembiaya atau ukuran proyek.

### ▼ Penataan dan transaksi

Pengembangan rencana proyek, langkah-langkah hukum untuk mendapatkan pembiayaan dan pengadaan konstruksi dan layanan operasi. Tahapan ini meliputi penutupan komersial dan finansial.

### ▼ Pasca Implementasi

Pemantauan dan evaluasi proyek untuk memastikan proyek memenuhi tujuannya dan mengusulkan perbaikan lebih lanjut jika diperlukan terhadap rencana proyek.

### CCFLA mendefinisikan PPF sebagai:



**organisasi, inisiatif, atau lembaga yang mendukung kota dalam pengembangan proyek yang layak dibiayai bank dan siap mendapatkan investasi, biasanya mulai konsep, rancangan, atau tahap pemeriksaan awal hingga pemenuhan pembiayaan (*financial close*).**



Selain seluruh cakupan kegiatan proyek, pemerintah daerah di Indonesia perlu menyertakan modalitas proyek dalam setiap studi kelayakan yang dilakukan untuk menentukan skema pembiayaan yang dapat dilaksanakan dan dukungan pemerintah yang diperlukan. Oleh karena itu, dalam tahap perencanaan, perlu dipertimbangkan berbagai pendekatan atau metode yang digunakan untuk membiayai dan mengelola proyek-proyek infrastruktur. Modalitas ini didasarkan pada kebutuhan dan karakteristik spesifik proyek itu sendiri, serta sumber pembiayaan dan berbagai peraturan yang berlaku.

Bantuan untuk persiapan proyek tersedia melalui [Fasilitas Persiapan Proyek](#) (Project Preparation Facility/PPF) yang didefinisikan oleh CCFLA sebagai “organisasi, inisiatif, atau lembaga yang mendukung kota dalam pengembangan proyek yang layak dibiayai bank dan siap mendapatkan investasi, biasanya mulai konsep, rancangan, atau tahap pemeriksaan awal hingga pemenuhan pembiayaan (*financial close*),” dan yang dapat memberikan bantuan teknis dan/atau keuangan. Lihat [bagian sumber daya](#) di panduan ini untuk informasi tentang PPF yang tersedia bagi pemerintah daerah di Indonesia.



## Langkah 2

# Pembiayaan proyek: Instrumen dan opsi

**Terdapat berbagai jenis skema dan opsi pembiayaan yang meliputi beberapa instrumen yang dapat diakses oleh pemerintah daerah. Instrumen ini bisa mencakup instrumen tradisional pembiayaan proyek (misalnya pinjaman lunak (*concessional loan*) dan hibah) atau instrumen pembiayaan campuran untuk suatu proyek.**

Poin penting yang perlu diperhatikan adalah pemerintah daerah di Indonesia tidak dapat mengakses pembiayaan langsung dari lembaga keuangan karena persyaratan yang ditetapkan pemerintah pusat<sup>7</sup>, misalnya:

- ▶ Jumlah kumulatif maksimum pembiayaan bergantung pada kapasitas keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan;
- ▶ Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha miliknya dalam menyalurkan dana tersebut;
- ▶ Pemerintah daerah tidak dapat memberikan jaminan untuk pinjaman;
- ▶ Pemerintah daerah tidak dapat menggunakan asetnya sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman.

Pemerintah daerah di Indonesia juga harus mampu mengatasi persoalan 'kemampuan memenuhi persyaratan bank' dalam pembiayaan proyek. Proyek infrastruktur yang layak dibiayai bank adalah proyek yang dianggap layak secara keuangan dan menarik bagi bank umum, atau investor swasta lainnya, yang bersedia membiayai proyek bersangkutan. Proyek ini memiliki rencana keuangan yang terstruktur dengan baik, aliran pendapatan usaha yang jelas, dan arus kas yang dapat diprediksi. Proyek ini juga memiliki strategi pengembalian investasi yang jelas bagi investor, yang memastikan bahwa investor dapat memperoleh kembali investasinya dalam jangka waktu sewajarnya. Meski demikian, pemerintah daerah dapat menjalankan peran lebih besar dalam membiayai proyek infrastrukturnya, terutama memastikan terjangkaunya tarif dan proyek tidak dapat dibiayai bank. Sebagai contoh, [Pemerintah DKI Jakarta](#) tengah membiayai proyek adaptasi perubahan iklim dengan anggarannya sendiri, dan memberikan bantuan keuangan berkesinambungan untuk proyek transportasi publiknya.

Di sisi lain, proyek infrastruktur yang tidak layak dibiayai bank merupakan proyek yang dianggap tidak layak dibiayai secara finansial oleh investor swasta. Proyek ini biasanya memiliki risiko tinggi, ketidakpastian, atau profitabilitas yang rendah, dan menjadikannya tidak menarik bagi investor swasta. Proyek ini juga mungkin tidak memiliki proyeksi aliran pendapatan usaha atau arus kas yang jelas, atau proyek ini mungkin memiliki periode pengembalian modal yang lebih lama, sehingga kurang menarik bagi penyedia dana dan investor.

Proyek infrastruktur yang tidak layak dibiayai oleh bank mungkin masih dianggap penting untuk kepentingan umum, misalnya, menyediakan layanan umum bagi masyarakat di daerah terpencil, meningkatkan kesejahteraan sosial, atau mengatasi masalah lingkungan. Dalam hal ini, Pemerintah atau organisasi internasional dapat membiayai atau memberikan subsidi untuk proyek ini agar layak secara finansial. Meski demikian, risiko gagal bayar atau tidak terbayarnya pinjaman umumnya lebih tinggi untuk proyek yang tidak layak dibiayai bank, sehingga menyulitkan pemberi pinjaman untuk menyediakan pembiayaan.

Berikut adalah ringkasan kategori sumber pembiayaan atau pendanaan yang tersedia bagi pemerintah daerah di Indonesia.

Sumber pembiayaan/pendanaan	Instrumen utama	Sumber pendanaan	Contoh opsi pembiayaan/pendanaan	Studi kasus
 <p><b>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)/Pendapatan 'Asli Daerah' (PAD)</b></p>	<p><b>APBD, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang 'diperuntukkan'</b></p>	<p>APBD dianggap tidak memadai di Indonesia karena rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah pusat menyediakan pengalihan anggaran untuk sektor tematik tertentu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belanja modal dari APBD</li> <li>Alokasi anggaran proyek infrastruktur</li> </ul>	<p><a href="#">Panel Atap Surya di Kantor Pemerintah di Jakarta</a></p>
 <p><b>Organisasi pembiayaan/pendanaan eksternal</b></p>	<p><b>Investasi dan hibah, pinjaman luar negeri</b></p>	<p>Investasi dan hibah adalah sumber utama pembiayaan dan pendanaan eksternal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah kota dapat menggalang dana dengan menawarkan obligasi (obligasi hijau, obligasi ketahanan, obligasi energi surya, dan jenis obligasi lainnya). Namun, ada persyaratan ketat bagi pemerintah daerah yang berencana menerbitkan obligasi<sup>8</sup>.</li> <li>Pemerintah kota juga dapat mempertimbangkan pinjaman lunak, jaminan, dana, hibah, dan investasi khusus yang merupakan jenis investasi lain dari bank pembangunan multilateral, lembaga pembiayaan pembangunan daerah, dan lembaga/yayasan filantropi yang juga dapat memberikan hibah. Bentuk pendanaan yang lebih baru antara lain urun daya (<i>crowdsourcing</i>) dan Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah kota dapat menawarkan obligasi hijau, obligasi ketahanan, obligasi energi surya, dan jenis obligasi lainnya.</li> <li>Jenis investasi lainnya: pinjaman lunak, jaminan, dana, dan investasi khusus.</li> <li>Hibah, baik yang 'diperuntukkan' maupun tanpa syarat dari entitas pemerintah internasional, pusat, atau daerah.</li> <li>Pemberi hibah potensial lainnya: bank pembangunan, perusahaan jasa keuangan, dan lembaga/yayasan filantropi.</li> <li>Bentuk pendanaan terbaru mencakup urun daya (<i>crowdsourcing</i>) dan Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility Funds/CSR)</li> </ul>	<p><a href="#">Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Daerah</a></p>
 <p><b>Mitra</b></p>	<p><b>Pendanaan, pembiayaan, atau keduanya</b></p>	<p>Kemitraan dapat mencakup pendanaan, pembiayaan, atau gabungan keduanya dari satu atau beberapa mitra sektor swasta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>KPBU (<i>public-private partnerships</i>) menggabungkan tujuan kebijakan publik dengan pembiayaan dan bantuan teknis sektor swasta untuk bersama-sama memajukan proyek dan inisiatif.</li> <li>Kemitraan dapat bertujuan untuk membagi risiko di antara beberapa pihak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menggabungkan tujuan kebijakan publik dengan pembiayaan dan dukungan teknis sektor swasta untuk bersama-sama mewujudkan proyek dan inisiatif.</li> <li>Pembayaran menggunakan APBD.</li> <li>Kemitraan bertujuan untuk membagi risiko di antara beberapa pihak, seperti mendirikan perusahaan dengan tujuan khusus dalam bentuk usaha patungan antara BUMD dan investor swasta.</li> </ul>	<p><a href="#">Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di Jawa Barat</a></p>

Instrumen keuangan komprehensif untuk pembiayaan upaya iklim kota dapat ditinjau dari daftar [instrumen keuangan CCFLA](#), sedangkan sumber daya bantuan teknis untuk opsi pendanaan dan pembiayaan untuk kota tersedia di bagian berikut dari panduan ini.



Terlepas dari adanya keterbatasan dan tidak bisanya pemerintah daerah dalam mengakses pembiayaan langsung, ada beberapa opsi lain yang tersedia untuk mendanai proyek penanganan perubahan iklim di tingkat kota, yaitu: ▶ ▶ ▶

## Langkah 3

# Modalitas keuangan prospektif untuk proyek iklim kota

### Membagi tanggungan biaya dengan Pemerintah Pusat



Skema ini melibatkan upaya untuk mengakses sumber pembiayaan eksternal, khususnya dari lembaga keuangan pembangunan, dan membagi tanggungan pembayaran pinjaman dengan Pemerintah Pusat. Skema ini dapat membantu pemerintah kota mendapatkan sumber pendanaan rendah biaya dan jangka panjang dengan dukungan/jaminan dari Pemerintah Pusat. Skema ini telah diterapkan dalam proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.

Proyek MRT Jakarta merupakan pinjaman dua tahap dari Kementerian Keuangan berupa perjanjian pembiayaan dengan Japan International Cooperation Agency (JICA), yang menyalurkan pinjaman sebagai hibah untuk pemerintah Jakarta. Tanggungan pembayaran pinjaman dibagi menjadi 49% pokok dan bunga yang akan dibayarkan oleh APBN dan 51% akan dibayarkan dari arus kas di tingkat kota. Skema ini telah mengatasi persoalan pembiayaan khususnya yang berkaitan dengan kapasitas fiskal Pemerintah Pusat dengan memanfaatkan pendanaan berbiaya rendah dan berjangka panjang dari APBN.

### Dana Pembangunan Infrastruktur Daerah



Dana ini melibatkan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebagai BUMN yang ditunjuk untuk memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah dengan jaminan dari Kementerian Keuangan.

Pinjaman yang diberikan oleh PT SMI disalurkan ke beberapa proyek yang mencakup kebutuhan infrastruktur dasar dan infrastruktur tahan perubahan iklim. Tujuan dari fasilitas ini adalah meningkatkan belanja infrastruktur di tingkat daerah dengan menggunakan perusahaan bertujuan khusus (EBK) dan instrumen utang yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan investasi di tingkat daerah.

### Skema Kemitraan Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)



Skema KPBU cocok digunakan untuk proyek berskala besar yang membutuhkan pembagian tanggungan risiko antara pembiayaan dari sektor publik dan swasta. Ada dukungan yang tersedia untuk meningkatkan kualitas investasi dari Pemerintah untuk mendorong pembiayaan penanganan perubahan iklim di tingkat daerah.

Contoh proyek KPBU adalah proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan di Jawa Timur. Skema pembiayaan proyek ini mencakup PPF dari PT SMI, dukungan kelayakan (*viability gap fund*) dari Kementerian Keuangan, dan jaminan proyek dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (IIGF).

### Investasi pemerintah daerah melalui BUMD



Pembentukan entitas bertujuan khusus (EBK) seperti badan usaha milik daerah (BUMD) akan memberikan manfaat kepada pemerintah daerah sebagai pemegang saham pengendali sehingga dapat melakukan pengawasan langsung dan memberikan dukungan fiskal yang berkesinambungan untuk proyek tersebut. BUMD juga memberikan keleluasaan untuk skema pembiayaan yang inovatif melalui lembaga keuangan pembangunan atau pembiayaan komersial. Sebagai perusahaan, BUMD juga memiliki opsi untuk mendapatkan pendanaan dari pasar modal.



## Langkah 4

# Mengakses pendanaan dalam negeri dan internasional

**Prinsip utama untuk mengakses pendanaan bagi pemerintah daerah di Indonesia menurut peraturan baru-baru ini tentang penyaluran antara anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah bahwa pendanaan dalam negeri dapat diakses secara langsung sedangkan akses pendanaan internasional harus disetujui oleh Kementerian Keuangan.**

## Pembiayaan dalam negeri



Pemerintah daerah dapat mengakses pembiayaan dalam negeri seperti pinjaman, penerbitan obligasi, dan hibah. Regulasi terbaru telah menghapus persetujuan DPRD untuk mengakses pembiayaan<sup>9</sup>. Namun, ada beberapa persyaratan untuk memperoleh pinjaman dari sumber dalam negeri, beberapa di antaranya ditetapkan Kementerian Keuangan. Pinjaman ini memang dapat diakses langsung dari bank setempat, tetapi karena regulasi tersebut juga membatasi kemampuan untuk memberikan jaminan atas pinjaman, hal ini menjadi hambatan bagi pemerintah kota untuk mengakses pembiayaan dari bank komersial. Sementara untuk hibah, pemerintah kota dapat memperolehnya langsung dari pendanaan eksternal.

Penerbitan obligasi daerah juga memiliki persoalan tersendiri, seperti minimnya proyek yang layak dibiayai bank, ketidaksesuaian antara selera investasi pasar dengan kapasitas fiskal, dan proyek yang mendasari penerbitan obligasi. Pemerintah daerah hanya dapat menerbitkan obligasi daerah dalam mata uang rupiah dan di pasar dalam negeri, dan tidak dapat menerbitkan obligasi untuk pasar luar negeri dan dalam mata uang asing. Lihat [publikasi ini](#) untuk informasi lebih lanjut mengenai persoalan terkait penerbitan obligasi daerah<sup>10</sup>.

## Pembiayaan internasional



Upaya mengakses pendanaan internasional berupa hibah maupun pinjaman melibatkan proses tambahan dan lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan kementerian sektoral tertentu, sesuai dengan karakteristik fundamental pendanaan proyek. Kementerian Keuangan akan melakukan uji kelayakan terhadap [proses pembiayaan](#) dan bekerja bersama pemerintah daerah untuk menyalurkan dana. Semua pendanaan internasional berupa hibah dan pinjaman bagi pemerintah, termasuk pemerintah daerah, harus dicantumkan dalam [green book](#) untuk hibah dan pinjaman tahunan dan [blue book](#) untuk pinjaman jangka menengah. Pemerintah daerah harus menyampaikan rencananya untuk memperoleh hibah dan pinjaman internasional kepada Bappenas untuk keperluan monitoring dan evaluasi.

<sup>9</sup> Sesuai uu nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

<sup>10</sup> Accelerating renewable energy finance in Indonesia: The potential of municipal green bonds. Climate Policy Initiative. July 2021. <https://www.climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2021/07/The-potential-of-municipal-green-bonds.pdf>

## Langkah 5

# Sumber daya dukungan teknis untuk pembiayaan iklim kota

Fasilitas Persiapan Proyek (PPF) membantu pemerintah daerah dengan memberikan bantuan selama tahap persiapan proyek dalam siklus proyek untuk menghubungkan proyek secara efektif dengan pembiayaan implementasinya. Program yang mendukung pemerintah kota dengan faktor khusus non proyek yang terkait dengan kelayakan finansial, seperti menciptakan lingkungan yang kondusif, mengembangkan kapasitas, dan menghubungkan dengan sektor keuangan sangat penting dalam membantu pemerintah kota untuk mempersiapkan proyek-proyek yang layak dibiayai bank. Akan tetapi, program ini tidak menawarkan bantuan tingkat proyek yang umumnya berkaitan dengan PPF.

Bantuan teknis dapat diberikan melalui beberapa bentuk, termasuk:

- ▶ **Bantuan bersifat mandiri:** alat bantu online, webinar sesuai permintaan, dan sumber lainnya; dan
- ▶ **Bantuan intensif:** dengan bantuan langsung dari penyedia layanan dalam bentuk konsultasi, bantuan pengembangan aplikasi, pendaan untuk mendukung persiapan proyek, dan bentuk dukungan lainnya.



Sebagian besar bantuan teknis diberikan dalam bentuk hibah. Hibah merupakan pendapatan negara yang tidak perlu dibayarkan kembali, yang dapat saja berasal dari sumber dalam negeri atau internasional. Berikut adalah beberapa kriteria untuk memperoleh hibah<sup>11</sup>:

- ▶ Pinjaman tersebut tidak perlu dibayarkan kembali.
- ▶ Keluaran dari pelaksanaan kegiatan hibah, baik berupa manfaat, kepemilikan barang, jasa yang diberikan, hasil penelitian, hak cipta, dan manfaat lainnya hanya diterima oleh dan semata-mata untuk kepentingan penerima hibah.
- ▶ Untuk menunjang tugas dan fungsi kementerian/ lembaga penerima hibah.

Hibah dapat diberikan dalam berbagai bentuk, termasuk berikut ini:

**Tunai:** hibah dalam bentuk uang yang diterima Pemerintah, dan penggunaannya ditentukan sepenuhnya oleh Pemerintah melalui mekanisme APBN.

**Uang untuk membiayai kegiatan:** hibah diterima Pemerintah, dialokasikan berdasarkan Kesepakatan Hibah, dan dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga/pemerintah daerah penerima hibah.

#### **Barang/Jasa:**

- ▶ **Barang:** hibah diterima Pemerintah dalam bentuk barang untuk mendukung kegiatan kementerian/ lembaga/pemerintah daerah/BUMN.
- ▶ **Jasa:** hibah diterima Pemerintah dalam bentuk jasa tertentu untuk mendukung kegiatan kementerian/ lembaga/pemerintah daerah/BUMN.

**Saham:** hibah diberikan dalam bentuk kepemilikan saham di perusahaan.

Jenis hibah antara lain:

- ▶ **Hibah terencana**, yang dilaksanakan melalui mekanisme terencana.
- ▶ **Hibah langsung**, yang dilaksanakan tanpa adanya mekanisme terencana, contohnya:
  - ▶ hibah untuk penanganan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan angin topan;
  - ▶ hibah dalam kerangka kerja sama teknis antara Kementerian dan Donor, misalnya lokakarya, pelatihan, dan seminar; dan
  - ▶ hibah kompetitif, misalnya penelitian.

Sementara itu, sumber hibah dapat berasal dari:

- ▶ **Dalam negeri:** lembaga keuangan dalam negeri, lembaga keuangan luar negeri, pemerintah daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, lembaga dan perorangan lainnya;
- ▶ **Internasional:** negara asing, lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lembaga multilateral, lembaga keuangan asing, lembaga nonkeuangan asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

<sup>11</sup> Dirangkum dari panduan pinjaman/hibah luar negeri Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (Panduan No.3/2020)

## Daftar PPF untuk infrastruktur tahan perubahan iklim di Indonesia

Informasi berikut ini merupakan yang terbaru per tanggal publikasi. Meskipun ada banyak sumber bantuan teknis yang intensif, bagian ini berfokus pada hibah persiapan proyek untuk proyek yang tengah dilaksanakan.

- ▼ **Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH):** mekanisme pendanaan lingkungan untuk menyalurkan dan mendistribusikan dana iklim dan lingkungan dari berbagai sumber yang akan mendukung visi lingkungan Indonesia.
- ▼ **Cities Development Initiative Asia (CDIA):** Sebuah inisiatif berdasarkan permintaan untuk kota-kota sekunder yang menyediakan bantuan teknis untuk menangani kebutuhan kota tersebut dan mempersiapkan investasi infrastruktur yang layak dibiayai bank. Kota-kota sekunder dapat terhubung dengan pembiaya melalui Project Preparation Studies/ PPS (Studi Persiapan Proyek) dan pengembangan kapasitas.
- ▼ **Bantuan Teknis KPBU PT Sarana Multi Infrastruktur:** Fasilitas yang dibentuk Kementerian Keuangan untuk pemerintah daerah untuk merancang dan menyediakan saran transaksi untuk pemeriksaan awal proyek tahap awal.
- ▼ **FELICITY:** Melaksanakan sebagian dokumentasi studi kelayakan (analisis keuangan dan ekonomi, Analisis Dampak Sosial dan Lingkungan, dan pengadaan) di tingkat kota dan provinsi.
- ▼ **C40 CFF:** Mendukung kota yang sedang dalam persiapan proyek infrastruktur yang siap mendapatkan pembiayaan dengan memberikan bantuan teknis yang mencakup pengembangan kapasitas, penataan proyek, dan penyusunan proposal bisnis.
- ▼ **WRI Electric Vehicle:** Melaksanakan analisis teknis, menyediakan pengembangan kapasitas terkait penggunaan kendaraan listrik di Bali, dan mendukung penyusunan Rencana Aksi Bali.
- ▼ **Green Building Performance Network (GBPN):** Menyediakan analisis teknis dan pengembangan kapasitas untuk mendorong proyek pembangunan hijau.
- ▼ **City Climate Finance Gap Fund:** Mendukung kota dengan memberikan bantuan teknis tahap awal untuk proyek rendah karbon dan tahan perubahan iklim serta rencana urbanisasi.
- ▼ **ASEAN Catalytic Green Finance Facility:** Mendukung pemerintah di Asia Tenggara dalam mempersiapkan dan membiayai proyek infrastruktur yang mendorong keberlanjutan lingkungan dan berkontribusi terhadap target penanganan perubahan iklim.
- ▼ **Green Climate Fund (GCF) Project Preparation Facility:** Mendukung proyek infrastruktur penanganan perubahan iklim dalam hal mitigasi dan adaptasi yang melibatkan pemerintah daerah. Mengakses pendanaan GCF melibatkan National Designated Authority/NDA (Otoritas Negara yang Ditunjuk), dan NDA di Indonesia adalah Kementerian Keuangan.

## Sumber daya Persiapan Proyek

Sumber daya untuk bantuan teknis mandiri:

- ▼ **Glosarium Persiapan Proyek:** Mendefinisikan dan menjelaskan istilah umum terkait persiapan proyek. Glosarium ini disusun oleh Cities Climate Finance Leadership Alliance (CCFLA).
- ▼ **Kelompok Aksi Persiapan Proyek – Sumber Daya:** Kelompok CCFLA ini melakukan identifikasi, koordinasi, dan percepatan PPF yang ada, dan telah menghasilkan banyak publikasi yang relevan bagi pejabat pemerintah kota.

Sumber daya untuk bantuan teknis intensif:

- ▼ **Matchmaker Program:** Inisiatif CDP untuk memanfaatkan data pelaporan lingkungan tingkat kota dan regional untuk menyoroti proyek yang siap dibiayai. CDP menyediakan bantuan konsultasi gratis untuk membantu pemerintah daerah mengembangkan pengetahuan dan kemampuan dalam mendorong proyeknya ke tahap pembiayaan, dan membantu pemerintah menjalin hubungan dengan komunitas investasi.

## Sumber daya strategi pembiayaan

Berikut adalah daftar sumber daya untuk bantuan teknis mandiri bagi pemerintah daerah sebagai referensi dalam mobilisasi pendanaan iklim:

### Cities Climate Finance Leadership Alliance:

[Laporan Kondisi Pembiayaan Iklim Perkotaan tahun 2021](#) mengkaji kondisi terkini investasi perubahan iklim perkotaan, hambatan dalam mencapai tingkat investasi yang dibutuhkan, dan langkah-langkah untuk mengatasi hambatan tersebut. Laporan ini juga berkontribusi [untuk inisiatif kerangka Leadership for Urban Climate Investment](#) yang diselenggarakan Aliansi, yang bertujuan menciptakan arsitektur global yang kuat untuk pembiayaan dan pelacakan penanganan perubahan iklim daerah.

**Glosarium Persiapan Proyek:** Menyediakan definisi istilah yang umum digunakan oleh PPF atau memberikan penjelasan mengenai kegiatan persiapan proyek.

**Direktori Sumber Daya Persiapan Proyek:** Membantu pemerintah dan pemangku kepentingan daerah mengidentifikasi PPF yang dapat membantunya mengembangkan infrastruktur hijau dan berketahanan, termasuk menerapkan sistem pemanasan dan pendinginan yang efisien, membangun infrastruktur energi terbarukan, menyiapkan sistem transit yang berkelanjutan, atau infrastruktur yang tahan perubahan iklim.

### Konsep dasar Pembiayaan Iklim Perkotaan:

- ▼ [Apa itu Persiapan Proyek?](#)
- ▼ [Apa yang dimaksud dengan Layak Dibiayai Bank?](#)
- ▼ [Apa yang dimaksud dengan PPF?](#)

### Lanskap Persiapan Proyek: Analisis Kesenjangan:

Makalah yang menyajikan pemetaan lanskap PPF dan mengidentifikasi kesenjangan dalam penawaran persiapan proyek ke pemerintah kota untuk infrastruktur yang berkelanjutan dan berketahanan dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari [Green City Finance Directory](#) (Direktori Pembiayaan Kota Hijau), suatu sumber daya berbasis web dari CCFLA.

**Memanfaatkan Bank Pembangunan Nasional untuk Meningkatkan Pembiayaan Infrastruktur Perkotaan Cerdas Iklim:** Memberikan gambaran tantangan dan peluang yang dihadapi kota dan Bank Pembangunan Nasional melalui konsultasi dengan pemerintah kota dan Bank Pembangunan Nasional secara global.

### Pohon Pengambilan Keputusan Pembiayaan Iklim:

Panduan komprehensif dari ICLEI – Local Governments for Sustainability dirancang untuk membantu pemerintah daerah mempertimbangkan berbagai alat bantu pembiayaan yang dijelaskan dalam panduan.

## Panduan lainnya

**Menu Pembiayaan:** CDP telah menyusun bagan alur untuk membantu pemerintah kota mencari opsi untuk berbagai jenis proyek infrastruktur, termasuk pembiayaan Climate/Emergency Resilience Hubs (Pusat Ketahanan Iklim/Darurat); opsi mobilitas netral karbon; hunian dan tempat kerja dengan emisi nol bersih yang terjangkau; kepemimpinan perkotaan terkait energi bersih dan efisiensi energi; lanskap komunitas yang regeneratif dan tangguh; serta kota yang mampu beradaptasi dengan banjir, dalam kondisi aman, dan layak huni. Menu ini juga menyertakan contoh kota yang telah menerapkan proyek yang relevan. Lihat deskripsi singkat di bawah ini untuk informasi lebih lanjut. Keseluruhan menu ini merupakan bagian dari *toolkit* daring [Sustainable Infrastructure Resources](#) CDP.

**Cara pemerintah kota mendorong pembiayaan adaptasi perubahan iklim sektor swasta.** Investasi swasta dibutuhkan untuk menghadapi besarnya tantangan adaptasi perubahan iklim perkotaan. Saat ini, pembiayaan swasta lebih banyak mendukung kebijakan mitigasi, sementara pembiayaan untuk adaptasi perubahan iklim dari sektor publik relatif sedikit. Artikel ini menjelaskan cara perkotaan, khususnya di Global South, untuk dapat meningkatkan

keterlibatan sektor swasta dalam mendorong masyarakatnya agar lebih tangguh menghadapi perubahan iklim.

### **Membongkar 10 mitos tentang kelayakan kredit kota.**

Joshua Gallo memimpin City Creditworthiness Initiative di Bank Dunia yang memberikan bantuan teknis kepada pemerintah kota. Joshua membantah mitos dan kesalahpahaman umum terkait kelayakan kredit, dan mendesak pemerintah kota yang tidak memiliki peringkat kredit untuk mulai mendapatkannya.

### **Cara membiayai proyek infrastruktur perkotaan:**

Sebuah penjelasan dari C40 CFF untuk pemerintah kota mengenai opsi pembiayaan, cara mengaksesnya, dan cara menentukan langkah yang paling tepat untuk membiayai proyek infrastruktur.

**Webinar tentang pembiayaan:** CDP juga memiliki sejumlah *webinar* pembiayaan yang membahas topik seperti dasar-dasar pembiayaan, mengakses modal untuk proyek energi bersih dan efisiensi energi, obligasi pemerintah kota (termasuk *webinar* khusus tentang tenaga surya), pembiayaan aset masyarakat bersama seperti transportasi publik dan sarana pengisian daya kendaraan listrik, ketahanan perkotaan, dan infrastruktur air.



# Kesimpulan

Panduan ini memberikan gambaran praktis mengenai berbagai sumber daya pembiayaan terkait penanganan perubahan iklim yang tidak hanya tersedia untuk kota tetapi juga kabupaten dan provinsi di Indonesia, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengakses sumber daya tersebut. Panduan ini berfokus mengenai PPF, dengan informasi tambahan tentang berbagai opsi pembiayaan untuk mengakses pendanaan nasional maupun internasional. Dengan meningkatnya risiko dan dampak perubahan iklim di kota-kota di Indonesia seperti banjir, degradasi lahan, dan naiknya permukaan air laut, ada kebutuhan mendesak bagi pemerintah daerah untuk menghadapi tantangan dan peluang yang muncul karena adanya perubahan iklim. Dengan memanfaatkan pembiayaan untuk penanganan perubahan iklim, pemerintah kota dapat menjalankan proyek dan program transformatif yang dapat mengurangi emisi GRK, membangun ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, dan memperbaiki kualitas hidup warganya.

Panduan ini menyoroti pentingnya persiapan proyek dan pengelolaan risiko dalam mengakses pembiayaan penanganan perubahan iklim, serta perlunya kemitraan dan kerja sama yang kuat antara kota, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya. Panduan ini juga menekankan diperlukannya transparansi dan akuntabilitas dalam pembiayaan penanganan perubahan iklim guna memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan dengan efektif dan efisien, serta manfaat dari tindakan penanganan perubahan iklim dirasakan semua pihak. Meskipun tidak dirancang untuk mencakup seluruh upaya yang diperlukan untuk mendapatkan pendanaan dan pembiayaan, panduan ini dapat membantu pemerintah daerah di Indonesia untuk mengambil langkah awal yang diperlukan dalam memajukan proyek dan infrastruktur terkait penanganan perubahan iklim.



## Penulis dan kontributor CDP Asia Pasifik

### Penulis Utama

Alke Haesra

### Kontributor

Dinda Dewinta

George Bush

Hanah Paik

Haryono Sirait

Karishma Kashyap

### Bekerjasama dengan

Global Covenant of Mayors for  
Climate and Energy (GCoM)



Untuk pertanyaan tentang kota dan pelaporannya, hubungi [citiesapac@cdp.net](mailto:citiesapac@cdp.net).

Untuk pertanyaan media, hubungi [media@cdp.net](mailto:media@cdp.net).

---

## Tentang CDP

CDP adalah organisasi nirlaba global yang menjalankan sistem pengungkapan lingkungan hidup di dunia untuk perusahaan, kota, negara bagian, dan wilayah. Didirikan pada tahun 2000 dan bekerja sama dengan lebih dari 740 lembaga keuangan dengan aset lebih dari \$130 triliun, CDP memelopori penggunaan pasar modal dan pengadaan korporat untuk memotivasi perusahaan dalam mengungkapkan dampak lingkungannya, serta mengurangi emisi gas rumah kaca, menjaga sumber daya air, dan melindungi hutan.

Hampir 20.000 organisasi di seluruh dunia mengungkapkan data melalui CDP pada tahun 2022, termasuk lebih dari 18.700 perusahaan yang bernilai setengah dari kapitalisasi pasar global, dan lebih dari 1.100 kota, negara bagian, dan wilayah. Selaras dengan TCFD, CDP memiliki basis data lingkungan terbesar di dunia, dan skor CDP digunakan secara luas untuk mendorong keputusan investasi dan pengadaan menuju ekonomi tanpa karbon, berkelanjutan, dan tangguh.

CDP adalah anggota pendiri inisiatif Science Based Targets, We Mean Business Coalition, The Investor Agenda, dan inisiatif Net Zero Asset Managers.

Kunjungi [www.cdp.net](http://www.cdp.net) atau ikuti kami di twitter/X [@CDP](https://twitter.com/CDP) untuk mengetahui lebih lanjut.